

RENCANA KERJA 2025

KECAMATAN BARENG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Bareng merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Bareng yang berpedoman RKPD Tahun 2025 guna pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renja Kecamatan Bareng sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pada tahun 2025. Program, kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang disusun berdasarkan orientasi dalam mewujudkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah

Harapan kami semoga Renja Kecamatan Bareng Tahun 2025 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

CAMATAN BARENG

Bareng, 10 Juli 2024

KCAMAT BARENG

Pembina Tingkat I

NIP. 19710806 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA I	PENGANTAR	i
DAFTA	AR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	I HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
	TAHUN LALU	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
	Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	
	Daerah	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
	2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	
	Fungsi Organisasi Perangkat Daerah	48
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	52
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
	Masyarakat	60
BAB III	I TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
	3.1 Telahaan Terhadap perubahan Kebijakan	
	Nasional	64
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	66
	3.3 Program dan Kegiatan	67
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
	DAERAH	81
BAB V	PENUTUP	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, termasuk Tata Cara Perubahan dari kedua rencana tersebut serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kecamatan atau yang dikenal dengan nama lain merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 221, disebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, kecamatan memiliki posisi strategis dimana camat sebagai pimpinan tertinggi harus mampu mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, serta memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan untuk Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode satu tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang memiliki arti strategis dalam pelaksanaan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Renja merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Renja juga menjadi acuan untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS, yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
- Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bareng.

Mengingat arti penting dari Renja, maka penyusunannya diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja SKPD yang dalam hal ini Rencana Kerja Kecamatan Bareng, penyusunan tersebut harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa dan Kecamatan mencakup 5 (lima) pendekatan, yakni:

- Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
- 2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
- 3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan.
- 4. Pendekatan Top-Down (Atas–Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program program jenjang pemerintah diatasnya.
- Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Bareng Tahun 2025 mengacu pada penyusunan RKPD Tahun 2025 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dengan tema/arah pembangunan daerah tahun 2025 yang harus dapat diwujudkan adalah "Hilirisasi Agrobisnis" serta sesuai tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- 13. Keptutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
- 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);

- 19. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
- 20. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
- 21. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2025 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
- 2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
- 3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- 4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pelaku pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan di era globalisasi dimana informasi terus berkembang maka pada tahun 2023 diarahkan pada pencapaian Misi yang ke-1 yakni: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.

Dalam rangka mendukung Misi tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bareng pada tahun 2023 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Kewilayahan 6 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 13 Kegiatan dan 23 sub kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang	Perencanaan,Penganggaran	Penyusunan
	Urusan Pemerintah	dan Evaluasi Kinerja	Dokumen
	Daerah	Perangkat Daerah	Perencanaan
			Perangkat Daerah
			Koordinasi dan
			penyusunan
			laporan capaian
			kinerja dan ikhtisar
			kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan
		Perangkat Daerah	Tunjangan ASN
			Pelaksanaan
			Penatausahaan dan
			Pengujian/Verifikasi
			Keuangan SKPD
			Koordinasi dan
			Penyusunan
			Laporan Keuangan
			Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan
			Penyusunan
			Laporan Keuangan
			Bulanan
			/Triwulanan
			/Semesteran SKPD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Administasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian
		Perangkat Daerah	Dinas beserta
			Atribut
			Kelengkapannya
		Administrasi Umum	Penyediaan
		Perangkat Daerah	Komponen Instalasi
			Listrik/ Penerangan
			Bangunan Kantor
			Penyediaan
			Peralatan dan
			Perlengkapan
			Kantor
			Penyediaan
			Peralatan Rumah
			Tangga
			Penyediaan Bahan
			Logistik Kantor
			Penyediaan Barang
			Cetakan dan
			Penggandaan
			Penyediaan Bahan
			Bacaan dan
			Peraturan
			Perundang -
		D 1 D M'111	Undangan
		Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Gedung Kantor atau
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Pemerman Daeran	Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana
			Pendukung Gedung
			Kantor atau
			Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa
		Penunjang Urusan	Komunikasi,
		Pemerintahan Daerah	Sumber Daya Air
		1 001001-01-1	dan Listrik
			Penyediaan Jasa
			Pelayanan Umum
			dan Kantor
		Pemeliharaan Barang	Penyediaan Jasa
		Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan,
		Urusan Pemerintahan	Biaya
		Daerah	Pemeliharaan,
			Pajak, dan
			Perizinan
			Kendaraan Dinas
			Operasional atau
			Lapangan
			Pemeliharaan
			/Rehabilitasi
			Sarana dan
			Prasarana Gedung

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan secara umum mengalami peningkatan baik penyerapan anggaran kegiatan. Rata-rata capaian kinerja kegiatan pada tahun 2023 mencapai 102,42% dengan penyerapan anggaran sebesar 89,38%.

Berikut disajikan secara terperinci pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2023 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi sekaligus kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut, yakni:

A. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

Semua program/kegiatan/Sub Kegiatan <u>tidak ada</u> yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

B. Realisasi Program/Kegiatan/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 89.08%
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja tercapai 100%, dan penyerapan anggaran 98,32%
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,19%
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 96,39%
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 87,40%
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 86,99%
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tercapai 100% dengan penyerapan anggaran 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,24%
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,52%
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,52%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,79%
 - Penyediaan Bahan Logistik kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 96,62%
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,58%

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 91,84%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,05%
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,61%
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,69%
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,48%
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 91,05%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 82,70%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,90%
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 97,12%
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 96,22%
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,79%
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK kinerja tercapai 111,14% dan penyerapan 97,21%
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,36%
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 98,36%
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 72,94%
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 72,94%

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 72,94%
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,36%
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,36%
 - Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangn-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,36%
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahan Nasional kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
- 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,98%
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 100%
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa kinerja tercapai 100% dan penyerapan anggaran 99,98%
- C. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan, adalah:

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK dengan indikator kinerja nilai PATEN ditargetkan 82 tercapai 94,69 dengan capaian kinerja 111,14% dan penyerapan anggaran 98,36%

D. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

<u>Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja</u> <u>Program/Kegiatan:</u>

- 1. Dukungan dan komitmen Camat Bareng, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Bareng untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014
- 3. Kompetensi SDM aparatur Kecamatan Bareng yang kompoten di bidangnya
- 4. Seluruh stakeholder Kecamatan memahami tupoksi dan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen PK, sehingga kinerja dapat tercapai maksimal.
- 5. Adanya monitoring kinerja setiap tribulan dari atasan dapat mengidentifikasi kendala dan masalah dalam pencapaian target kinerja.

E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng. Dari program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bareng sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng tahun 2018-2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bareng pada umumnya,
- ✓ Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target/ melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Bareng.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu.
- 2. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD Tahun 2023.
- 3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi serta memberikan pendampingan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- 4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kepada OPD terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bareng dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (outcomes)/Kegiatan (output) (Renst Perangl Daerah) T	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	n Kinerja Hasil m Program dan ra Keluaran kat Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
	01 Program penunjang		Daerah) Tahun		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	N/A	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	N/A	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Bareng yang di fasilitasi	N/A	14 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	erintahan Daerah Program/Kegiatan (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2022)	Target dan Re Kegiat	alisasi Kinerja Prog tan Tahun Lalu (n-2	gram dan 2)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	N/A	3 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	N/A	5 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah pemenuhan barang cetak	N/A	20 Buku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	penggandaan	Jumlah pemenuhan barang penggandaan	N/A	5000 Lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	N/A	1 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	ram/Kegiatan Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Capaian Ki Program Pr (Renstra I Perangkat Ke	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Re Kegiat	alisasi Kinerja Pro tan Tahun Lalu (n-2	gram dan 2)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
	.01.2.07 Pengadaan Barang		Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pengadaan sarana Gedung Kantor	N/A	3 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Bareng	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	18 Stel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	N/A	3 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	N/A	12 Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	nan Daerah Program Capai n/Kegiatan (outcomes)/Kegiatan (output) (Rens Perang Daerah)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Capaian Kinerja Hasil Program Program dan (Renstra Keluaran Perangkat Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	N/A	10 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	N/A	10 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Bareng yang dipelihara	N/A	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	N/A	10 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A	2 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	2 Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	N/A	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	N/A	81,24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A	26 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2022)	Target dan Re Kegiat	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	N/A	26 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	N/A	26 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	N/A	26 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	N/A	13 BUMDes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	N/A	13 TP PKK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	26 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	N/A	26 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	N/A	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	12 Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pemerintahan Daerah an Program/Kegiatan (outcomes)/Kegiatan (output)	Capaian n Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2022)	Target Ronio Poolicasi Ronio Tingkat			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
				tanun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	5 Laporan	5 Laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	16 Orang / Bulan	16 Orang / Bulan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d		alisasi Kinerja Pro tan Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisa Renstra Perangkat Berj	Daerah s/d tahun
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi	N/A	N/A	10 paket	10 paket	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	23 paket	23 paket	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	1 Paket	1 Paket	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	N/A	2 paket	2 paket	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	N/A	1 Jenis	1 Jenis	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	ngkat Realisasi h tahun (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	1 unit	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	12 unit	12 unit	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	N/A	36 Laporan	36 Laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	25 laporan	25 laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	10 unit	10 unit	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Perangkat Perangkat Realisasi Daerah tahun Daerah tahun (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	16 unit	16 unit	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	100 orang	100 orang	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	N/A	N/A	82,00	94,69	115,48%	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d		alisasi Kinerja Pro tan Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisa Renstra Perangkat Berj	Daerah s/d tahun
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A	N/A	26 Lembaga	26 Lembaga	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APBDesa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	N/A	N/A	26 Desa	26 Desa	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	N/A	N/A	26 Lembaga	26 Lembaga	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	N/A	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasuspelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	N/A	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	N/A	N/A	N/A

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d		alisasi Kinerja Pro tan Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Renstra Perangkat	si Capaian Target Daerah s/d tahun alan
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	100%	N/A	N/A	N/A
7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d		alisasi Kinerja Prop an Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisa Renstra Perangkat Berj	Daerah s/d tahun
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	16 Orang/Bulan	16 Orang/Bulan	100%
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	22 Paket	22 Paket	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.0001	Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	9 Paket	9 Paket	100%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	30 Paket	30 Paket	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d		alisasi Kinerja Prop tan Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Renstra Perangkat	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	1 Paket	100%	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Paket	2 Paket	100%	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	100%	
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1 Unit	1	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Unit	7 Unit	100%	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2022)		alisasi Kinerja Prog an Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
			Daerah) Tahun		Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	36 Laporan	36 Laporan	100%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	25 Laporan	25 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	13 Unit	13 Unit	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	94,75 Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	94.75 Nilai	94.75 Nilai	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d		alisasi Kinerja Pro tan Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024		si Capaian Target : Daerah s/d tahun alan
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023) Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024		
	kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 Orang	100 Orang	100%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d		alisasi Kinerja Prop tan Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024	Perkiraan Realisa Renstra Perangkat Berj	Daerah s/d tahun
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkai	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	13 Desa	13 Desa	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d		alisasi Kinerja Pro tan Tahun Lalu (n-2		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2024		si Capaian Target : Daerah s/d tahun alan
			Daerah) Tahun	tahun (n-3/2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2/2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1/) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	26 Dokumen	26 Dokumen	100%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	26 Lembaga	26 Lembaga	100%
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	13 Desa	13 Desa	100%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 Lembaga Kemasyakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	78 Lembaga Kemasyakatan	78 Lembaga Kemasyakatan	100%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	4 Laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Bareng merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Bareng, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Bareng adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bareng menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

- Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program
 Sampai dengan periode tribulan IV tahun 2023 Kecamatan Bareng menyusun 3 dokumen perencanaan yaitu dokumen renja 2023,
 Perubahan Renja 2023 dan Perubahan Renstra 2024-2026.
 Pengendalian dan Evaluasi Program sebanyak 5 dokumen yaitu dokumen LKJiP 2023, monitoring capaian kinerja dan anggaran tribulan 1,2,3 dan 4
- Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
 Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terlaksananya musrenbang kecamatan, terlaksananya musrenbangdes di 13 desa, koordinasi dan patroli

keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bareng, terlaksananya penyebarluasan informasi dan penyuluhan bagi masyarakat seperti penyuluhan PSN, peringatan HUT RI, Rapat Pleno Rutin PKK setiap bulan, koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KIS, Bansos dll, pembinaan administrasi pemerintahan desa, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang meliputi pelayaanan KK, perekaman KTP, surat pindah, SKCK, dll.

Kecamatan bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan yang efektif di wilayah kecamatan. Sejalan dengan tugas tersebut, perlu diadakan kegiatan pemberdayaan yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya di tingkat kecamatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini dapat berupa acara gelar potensi, pameran UMKM, atau sejenisnya, yang diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada, seperti pengembangan pariwisata, produk lokal, atau inisiatif lainnya. Selain itu, gelar potensi juga bisa digunakan untuk pengembangan pariwisata terpadu di Kecamatan Bareng, termasuk situs budaya Candi Arimbi, Air Terjun Grenjeng, dan Wisata Pandan Sili, yang dipadukan dengan kesenian kuda lumping. Pengembangan pariwisata terpadu di Kecamatan Bareng memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian lokal, melestarikan budaya, dan menjaga lingkungan.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lain yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini, Kecamatan Bareng menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisasi	Capaian	Pro	yeksi	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	
1.2	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	16 orang/bulan	N/A	N/A	N/A	16 orang/bulan	N/A	N/A	N/A	
1.2.2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisasi	Capaian	Prog	yeksi	Catatan Analisis
110	indinator .	Nasional	1111	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.2.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.3.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	-	-	10 Paket	N/A	N/A	N/A	10 Paket	N/A	N/A	N/A	
1.3.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	23 Paket	N/A	N/A	N/A	23 Paket	N/A	N/A	N/A	
1.3.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	N/A	N/A	N/A	1 Paket	N/A	N/A	N/A	
1.3.4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	2 paket	N/A	N/A	N/A	2 paket	N/A	N/A	N/A	
1.3.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	
1.3.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	4 laporan	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	
1.4	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.4.1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	N/A	N/A	N/A	1 Unit	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisasi	Capaian	Proy	7eksi	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.4.2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	12 Unit	N/A	N/A	N/A	12 Unit	N/A	N/A	N/A	
1.5	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kec. Bareng	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.5.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.6	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	36 Laporan	N/A	N/A	N/A	36 Laporan	N/A	N/A	N/A	
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	25 laporan	N/A	N/A	N/A	25 laporan	N/A	N/A	N/A	
1.7	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	10 unit	N/A	N/A	N/A	10 Unit	N/A	N/A	N/A	
1.7.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisasi	Capaian	Proy	reksi	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.7.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	16 unit	N/A	N/A	N/A	16 Unit	N/A	N/A	N/A	
2	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
2.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	-	-	1 laporan	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	-	-	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	
2.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	100 orang	N/A	N/A	N/A	100 Orang	N/A	N/A	N/A	
2.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	4 laporan	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	
3	Nilai Paten Kecamatan	-	-	82	N/A	N/A	N/A	94,69	N/A	N/A	N/A	
3.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
3.1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	-	12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	
4	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	50%	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisasi	Capaian	Pro	yeksi	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	-	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	
4.1	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	-	-	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	26 lembaga	N/A	N/A	N/A	
4.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	4 laporan	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	
4.1.1	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
4.2.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
4.2.2	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	-	-	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	
4.2.3	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	26 dokumen	N/A	N/A	N/A	
5	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	-	-	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisas	i Capaian	Proy	yeks i	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
5.1	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	-	-	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	
5.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	-	-	12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	100%	100 %	100 %	
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	100%	N/A	N/A	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	N/A	2 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	N/A	1 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	N/A	5 Laporan	5 laporan	5 laporan	N/A	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
1.2	Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	50%	100 %	100 %	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisa	asi Capaian	Proy	zeksi	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	100%	100 %	100 %	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	N/A	16 Orang/Bulan	16 orang/bulan	16 orang/bulan	N/A	16 Orang/Bulan	16 orang/bulan	16 orang/bulan	
1.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	N/A	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	N/A	6 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	N/A	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	N/A	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	
1.3	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	18%	100 %	100 %	
1.3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	22 Paket	38 paket	38 paket	N/A	6 Paket	38 paket	38 paket	
1.4	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	50%	100 %	100 %	
1.4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	9 Paket	8 paket	8 paket	N/A	9 Paket	8 paket	8 paket	
1.4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	30 Paket	24 paket	24 paket	N/A	30 Paket	24 paket	24 paket	
1.4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	1 Paket	1 paket	1 paket	N/A	1 Paket	1 paket	1 paket	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisa	si Capaian	Proy	7eksi	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.4.4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	N/A	2 Paket	2 paket	2 paket	N/A	2 Paket	2 paket	2 paket	
1.4.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	N/A	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	N/A	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
1.4.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	N/A	4 Laporan	4 laporan	4 laporan	N/A	2 Laporan	4 laporan	4 laporan	
1.5	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	71%	100 %	100 %	
1.5.1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	1 unit	1 unit	N/A	N/A	1 unit	1 unit	
1.5.2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	7 Unit	4 unit	5 unit	N/A	5 Unit	4 unit	5 unit	
1.6	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	100%	100 %	100 %	
1.6.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	N/A	36 Laporan	36 laporan	36 laporan	N/A	18 Laporan	36 laporan	36 laporan	
1.6.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	25 Laporan	25 laporan	25 laporan	N/A	13 Laporan	25 laporan	25 laporan	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisa	si Capaian	Proy	zeksi	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.7	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	50%	100 %	100 %	
1.7.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	N/A	10 Unit	10 unit	10 unit	N/A	4Unit	10 unit	10 unit	
1.7.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	2 Unit	2 unit	2 unit	N/A	1 Unit	2 unit	2 unit	
1.7.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	13 Unit	16 unit	16 unit	N/A	8 Unit	16 unit	16 unit	
2	Nilai Paten Kecamatan	-	-	N/A	94,75 Nilai	94,80 Nilai	94,85 Nilai	N/A	N/A	94,80 Nilai	94,85 Nilai	
2.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	50%	100 %	100 %	
2.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	N/A	6 Laporan	12 laporan	12 laporan	
3	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	40%	100 %	100 %	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	50%	100 %	100 %	

NO	Indikator	SPM/ Standar	IKK					Realisa	si Capaian	Proy	zeksi	Catatan Analisis
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
3.1	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	-	-	N/A	5 Laporan	5 laporan	5 laporan	N/A	2 Laporan	5 laporan	5 laporan	
3.2	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	-	-	N/A	4 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	N/A	2 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
3.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	N/A	100 Orang	100 orang	100 orang	N/A	-	100 orang	100 orang	
3.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	N/A	4 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	N/A	2 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
4	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	50%	100 %	100 %	
4.1	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	50%	100 %	100 %	
4.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	-	-	N/A	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	N/A	6 Laporan	12 laporan	12 laporan	

NO	Indikator	IKK				Realisa	asi Capaian	Proy	yeksi	Catatan Analisis		
		Nasional		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
5	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	100%	100 %	100 %	
5.1	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	-	-	N/A	13 Desa	13 desa	13 desa	N/A	13 Desa	13 desa	13 desa	
5.1.1	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	N/A	26 Dokumen	26 dokumen	26 dokumen	N/A	13 Dokumen	26 dokumen	26 dokumen	
6	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	-	-	N/A	100%	100 %	100 %	N/A	0%	100 %	100 %	
6.1	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	-	-	N/A	26 Lembaga	26 lembaga	26 lembaga	N/A	26 Lembaga	26 lembaga	26 lembaga	
6.2	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	-	-	N/A	13 Desa	13 desa	13 desa	N/A	0 Desa	13 desa	13 desa	
6.1.1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	-	-	N/A	78 Lembaga Kemasyakatan	78 lembaga kemasyakatan	78 lembaga kemasyakatan	N/A	0 Lembaga Kemasyakatan	78 lembaga kemasyakatan	78 lembaga kemasyakatan	
6.2.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	4 Laporan	4 laporan	4 laporan	N/A	2 Laporan	4 laporan	4 laporan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Bareng dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 2. Isu isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Bareng dapat dikategorikan dalam uraian uraian berikut ini ::
 - a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Bareng adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan

b. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan

c. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembinaan Pemerintah Desa yang kurang terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Dalam penyusunan laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat, seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes di susun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

e. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Bareng karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai

Dari permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah "Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan".

- 3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPD Kab. Jombang Tahun 2024-2026
 - Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Bareng belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah kelima yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2024 yakni peningkatan kualitas pelayanan public, keamanan dan ketentraman umum
- 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan:

- Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan;
- Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e- KTP di Kecamatan Bareng saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e KTP terkadang tidak dapat dioperasionalkan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;
- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Bareng cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang

ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.

Peluang:

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Bareng terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

- 5. Formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
 - a. Perencanaan Pembangunan
 - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
 - Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perubahan rencana strategis.
 - > Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun OPD Kecamatan Bareng dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Bareng dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bareng di tuntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal yang bisa kita lihat dalam indeks kepuasan masyarakat yang selalu meningkat setiap tahun dan untuk mempertahankan dan memperbaiki indeks kepuasan masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang up to date.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pembinaan kepada Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih

e. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Diperlukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur desa untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang kompeten dan tertib administrasi sehingga untuk pemenuhan dokumen dokumen seperti penyusunan RKPDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes dapat tepat waktu

f. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih kurangnya kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Bareng karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat di ikuti oleh pegawai

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Bareng sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana hal ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan daerah dan kiranya perlu untuk menjadi perhatian pada tahuntahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada arah kebijakan tahap ke-4 periodesasi 2005-2025 dari dokumen RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Bareng Tahun 2025.

penyempurnaan dilakukan Dalam proses penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Bareng dalam melaksanakan Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan aparatur vang cerdas. terampil, bertangggungjawab, inovatif dan kapabel. Hal tersebut berarti aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean governent dan good governance.

Kecamatan Bareng mempunyai peran penting dalam proses pembangunan mendukung keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi dan politik di Kecamatan Bareng membutuhkan sinergitas antar seluruh SKPD, disebabkan terbatasnya anggaran dengan kebutuhan pembangunan yang cukup banyak. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kebijaksanaan dalam melihat secara komprehensif demi peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bareng.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Jombang

]	Rancangan Awal RKPD				На	asil Analisis Kebutuhan			
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bareng	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.717.734.830	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bareng	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.639.457.159	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	5.735.200	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	9.495.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.122.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.970.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	612.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	525.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.262.028.344	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2.294.656.709	
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%		
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bulan	2.185.737.744	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bulan	2.215.813.709	

]	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	75.678.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	78.318.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	612.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	525.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	N/A	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	100%	9.000.000	
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Bareng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	N/A	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Bareng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	9.000.000	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	97.092.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bareng	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	91.213.950	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	9 paket	3.348.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	9 paket	3.833.800	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	15.054.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	14.528.150	
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	53.150.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Bareng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	50.730.000	
1.3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bareng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.750.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bareng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.674.000	

		1	Rancangan Awal RKPD				H	asil Analisis Kebutuhan			
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000	
1.3.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	19.438.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	18.448.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bareng	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	194.906.236	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bareng	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	73.897.500	
1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	115.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	0	
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Bareng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	42 Unit	79.906.236	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec. Bareng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	73.897.500	
1.6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Bareng	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	101.290.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Bareng	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	101.906.000	
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	48.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	49.200.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	52.690.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	52.706.000	

		1	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bareng	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	56.682.350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bareng	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	59.288.000	
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Bareng		10 unit	40.150.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Bareng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	45.010.000	
1.7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 unit	11.862.350	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	9.608.000	
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	4.670.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bareng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	4.670.000	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Bareng	Nilai Paten Kecamatan	85,40	7.654.350	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Bareng	Nilai Paten Kecamatan	94,80	4.315.000	
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bareng	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	7.654.350	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bareng	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	4.315.000	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	7.654.350	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.315.000	

]	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Bareng	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	72.058.000	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Bareng	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	149.503.369	
		Kec. Bareng	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%			Kec. Bareng	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%		
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bareng	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	72.058.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bareng	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	149.503.369	
		Kec. Bareng	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen			Kec. Bareng	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen		
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	25.908.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bareng	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	101.763.369	
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	46.150.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	47.740.000	
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Bareng	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkaitke Instansi Terkait	100%	25.065.000	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Bareng	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkaitke Instansi Terkait	100%	19.640.000	
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Bareng	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	25.065.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Bareng	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 kegiatan	19.640.000	

]	Rancangan Awal RKPD				Н	asil Analisis Kebutuhan			
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	25.065.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	19.640.000	
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Bareng	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	16.112.500	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Bareng	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	14.450.000	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bareng	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 desa	16.112.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bareng	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 desa	14.450.000	
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	16.112.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bareng	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	14.450.000	
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Bareng	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyakat yang aktif	100%	37.177.500	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Bareng	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	141.872.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bareng	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	37.177.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bareng	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	141.872.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	10	10	9	11	12
			Jumlah desa yang menyusun RKPDes	13 desa				Jumlah desa yang menyusun RKPDes	13 desa		
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bareng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	78 lembaga	15.030.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bareng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	78 lembaga	15.150.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	22.147.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bareng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	126.722.000	
	то	TAL			2.875.802.180	TOTAL				2.969.237.528	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Bareng sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Bareng didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kecamatan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bareng dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang berkaitan dengan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan Renstra.
- b. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.

- c. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan sinergitas kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas *collecting* data,
- d. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Bareng sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada RKPD Kab. Jombang Tahun 2025, maka ditetapkan Renja Kecamatan Bareng Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Kec. Bareng	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3 Unit	- Menambah Anggaran Untuk Pengadaan Kruk, Tongkat Tuna Netra dan Tongkat Cakram untuk Pelayanan PATEN penyandang Disabilitas (Di Kecamatan Saat ini masih ada kursi Roda, Untuk Kruk, Tongkat Tuna Netra dan Tongkat Cakram masih belum ada)
		Kec. Bareng		50 Buah	- Menambah Anggaran Untuk Kursi Rapat / Pertemuan (Kursi Rapat / Pertemuan Kondisi Banyak yang Rusak dan Sudah Tidak Layak digunakan)

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Kec. Bareng		1 Paket	- Menggeser Anggaran Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor ke Dinas PUPR (Belum tersedianya Pegawai yang menangani Pembangunan Fisik (Gedung Kantor)
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bareng	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	12 Bulan	- Menambah Anggaran Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan (Sosialisasi aplikasi SIKS NG ke Desa – Desa, sehingga data DTKS lebih update)
		Kec. Bareng		12 Bulan	- Menambah Anggaran Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan dan Pendidikan (Rapat Koordinasi Lomba Sekolah Sehat Berkarater)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana RPJPD, RPD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema , "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" yang dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional (PN):

- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana kerja Daerah harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah oleh karena itu tema/ arah pembangunan daerah tahun 2025 adalah **"Hilirisasi Agribisnis"** yang dijabarkan dalam 3 prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah:

- 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Harmonis
- 2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas
- 3. Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dan merata

Dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tahun 2025, yaitu **Hilirisasi Agribisnis**. akan diselenggarakan Gelar Potensi dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan Produk Unggulan

Menampilkan berbagai produk unggulan dari sektor agribisnis yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Bareng bertujuan untuk membantu UMKM agar dapat menjangkau pasar baru yang lebih luas, baik secara regional, nasional, maupun internasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan popularitas merek mereka

2. Mendorong Investasi

Mendorong minat para investor untuk menginvestasikan modal mereka dalam sektor agribisnis di kecamatan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian daerah

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengembangan agribisnis, khususnya sebagai konsumen utama terhadap hasil produk mereka sendiri

4. Menciptakan Jaringan Bisnis

Untuk menciptakan dan memperluas jaringan bisnis antara petani lokal, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya dalam rangka memperkuat rantai pasokan dan distribusi produk agribisnis.

Selain pertanian, Kecamatan Bareng memiliki beberapa potensi, antara lain :

- a. Di Desa Banjaragung terdapat Wisata Bale Tani, sebuah destinasi wisata yang bertema edukasi pertanian
- b. Di Desa Ngampungan terdapat Wisata Pandansili, sebuah wahana wisata air yang hulunya berasal dari pegunungan dan memancar tidak jauh dari kolam renang. Airnya tentunya jernih dan menyegarkan
- c. Di Desa Pulosari terdapat Candi Arimbi, sebuah cagar budaya yang diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi ini juga dikenal sebagai pintu gerbang masuk Majapahit bagian selatan. Selain itu, di

- Desa Pulosari juga terdapat Kirab Budaya dan Festival Arimbi Bercerita, yang rangkaian acaranya berlangsung di Komplek Candi Arimbi
- d. Di Desa Mundusewu terdapat Wisata Lembah Ginten yang menawarkan kolam renang untuk anak-anak, terletak di lembah yang sejuk. Selain itu, desa ini juga memiliki sanggar seni singo barong dan terkenal sebagai pusat pande besi
- e. Di Desa Jenisgelaran terdapat Air Terjun Grenjeng, sebuah objek wisata yang cocok menjadi alternatif untuk melepas penat. Selain udaranya yang sejuk, deru air yang jatuh dari ketinggian dan gemericik air yang membelah bebatuan memberikan ketenangan bagi siapa saja yang berkunjung ke sini
- f. Di Desa Pakel terdapat Kirab Budaya "Arak Tumpeng Ponco Tuk," sebuah tradisi budaya yang menyatukan lima sumber mata air dari setiap dusun dalam sebuah ritual. Dalam ritual ini, tari Bedayan Majakirana dilakukan untuk menyatukan lima sumber mata air nagari menjadi Panca Tuk, yang kemudian diakhiri dengan tari Ujung Puri Aji. Tari ritual ini memohon agar hujan segera turun, sehingga masyarakat dapat segera bercocok tanam dan tidak mengalami kekeringan yang berkepanjangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 dimana merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2025 terdapat 3 (empat) prioritas pembangunan, dengan tema/arah pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu "Hilirisasi Agribisnis".

Guna mendukung Arah Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja tahun 2025 adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Bareng dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran OPD

Kecamatan Bareng tahun 2025 adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bareng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	74,85
		1. Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bareng	74,50
			Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	63,45
		2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng	8,10

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pencapaian Tujuan Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Bareng diarahkan untuk mencapai Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik dengan sasaran RPD adalah "Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi" yang selaras dengan tujuan OPD yaitu "Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi"

Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs adalah merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban

untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Bareng diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

Pemberantasan Kemiskinan

Seialan dengan upava negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Demikian pula halnya dengan penanggunglan kemiskinan di Kecamatan Bareng. Program dan kegiatan yang dirancang pada Renja 2025 PD Kecamatan Bareng yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitasi dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

> Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak

ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bareng diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pengarustamaan Responsive Gender

Integrasi pengarusutamaan responsive gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan melalui Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, diakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses. Keterlibatan perempuan dalam penyusunan dokumenen perencanaan sudah dilaksanakan pada saat Forum OPD Penyusunan Renja 2025 dengan yang menghadirkan perwakilan tokoh perempuan dan PKK

Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Bareng di Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan perekonomian. Potensi ini terutama terkait dengan industri kecil di bidang kerajinan seperti pembuatan lis, pengrajin sepatu, serta sektor pertanian seperti padi, jagung, sayur, dan tembakau pada musim tertentu. Semua potensi ekonomi ini

diupayakan untuk lebih diberdayakan dan dikembangkan di Kecamatan Bareng melalui penyusunan berbagai program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah serta membuka peluang kerja

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

> Jumlah Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Bareng Tahun 2025 mencakup 6 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

> Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

> Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN **PUBLIK**

- > Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- a. Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- > Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- > Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Dari 6 (empat) program dan 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 untuk dilaksanakan di Kecamatan

Bareng sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Bareng dan melingkupi semua Desa (13 Desa).

> Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sumber pendanaan seluruh program dan kegiatan pada Renja 2025 berasal dari APBD Kab. Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 2.969.237.528-

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

d. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bareng Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH: KECAMATAN BARENG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA		NA TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026			
KODE	PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Unsur Kewilayahan				2.969.237.528,00	Dana Alokasi Umum			6.356.873.424,90
7,01	Kecamatan				2.969.237.528,00	Dana Alokasi Umum			6.356.873.424,90
7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kecamatan Bareng	100%	2.639.457.159,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	6.253.017.624,90
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kecamatan Bareng	100%	9.495.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	7.829.750,00
7.01.01.2.01.0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bareng	3 dokumen	8.970.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	3 Dokumen	7.139.850,00
7.01.01.2.01.0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bareng	5 dokumen	525.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	5 Dokumen	689.900,00

	URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA		NA TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026			
KODE	PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kecamatan Bareng	100%	2.294.656.709,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	2.937.689.904,90
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Kecamatan Bareng	100%				100%	
7.01.01.2.02.0001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bareng	16 orang/ bulan	2.215.813.709,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	16 orang/ bulan	2.863.491.904,90
7.01.01.2.02.0003	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Bareng	12 dokumen	78.318.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 dokumen	71.598.000,00
7.01.01.2.02.0005	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Bareng	1 Laporan	525.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 Laporan	2.600.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	Kecamatan Bareng	100%	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	13.300.000,00
7.01.01.2.05.0002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Bareng	15 paket	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	38 paket	13.300.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Bareng	100%	91.213.950,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	111.175.270,00

	URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2025					AAN MAJU TAHUN 2026	
KODE	PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.01.2.06.0001	1. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	9 paket	3.833.800,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	8 Paket	5.049.470,00	
7.01.01.2.06.0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	30 paket	14.528.150,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	24 Paket	16.810.800,00	
7.01.01.2.06.0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 paket	50.730.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 paket	65.135.000,00	
7.01.01.2.06.0005	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Bareng	2 paket	3.674.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	2 paket	5.300.000,00	
7.01.01.2.06.0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Bareng	1 dokumen	2.352.000	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	1 dokumen	2.220.000,00	
7.01.01.2.06.0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bareng	4 laporan	18.448.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	16.660.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Bareng	100%	73.897.500,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	3.041.862.700,00	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bareng	N/A	-	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	1 Unit	3.000.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA		NA TAHUN 2025		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026			
	PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Bareng	7 Unit	73.897.500,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	5 Unit	41.862.700,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Bareng	100%	101.906.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	87.520.000,00
7.01.01.2.08.0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Bareng	36 laporan	49.200.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	36 Laporan	35.100.000,00
7.01.01.2.08.0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Bareng	25 laporan	52.706.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	25 Laporan	52.420.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Bareng	100%	59.288.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	53.640.000,00
7.01.01.2.09.0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Bareng	10 unit	45.010.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	10 unit	30.104.000,00
7.01.01.2.09.0009	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bareng	2 unit	9.608.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	2 unit	10.100.000,00

	URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA		NA TAHUN 2025		PRAKIRA	AAN MAJU TAHUN 2026		
KODE	PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0010	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Bareng	13 unit	4.670.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	16 Unit	13.436.000,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Kecamatan Bareng	94,80	4.315.000,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	94,85	6.975.800,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Kecamatan Bareng	100%	4.315.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	100%	6.975.800,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	12 laporan	4.315.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 laporan	6.975.800,00
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Kecamatan Bareng	100%	149.503.369,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	30.496.600,00
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Kecamatan Bareng	100%		Dana Alokasi Umum		100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Kecamatan Bareng	5 laporan	149.503.369,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	5 laporan	30.496.600,00
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Kecamatan Bareng	4 dokumen				4 dokumen	

	URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2025					RAAN MAJU TAHUN 2026	
KODE	PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Bareng	100 orang	101.763.369,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	100 orang	21.846.800,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan	47.740.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	8.649.800,00	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Kecamatan Bareng	100%	19.640.000,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	12.951.300,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Kecamatan Bareng	12 kegiatan	19.640.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	12 kegiatan	12.951.300,00	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kecamatan Bareng	12 laporan	19.640.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	12 laporan	12.951.300,00	

	URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA		NA TAHUN 2025		PRAKIRA	AAN MAJU TAHUN 2026		
KODE	PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Kecamatan Bareng	100%	14.450.000,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	21.527.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Kecamatan Bareng	13 desa	14.450.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	13 desa	21.527.400,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bareng	26 dokumen	14.450.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	26 dokumen	21.527.400,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Kecamatan Bareng	100%	141.872.000,00	Dana Alokasi Umum	Program Lanjutan	100%	31.904.700,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Kecamatan Bareng	26 lembaga	141.872.000,00	Dana Alokasi Umum	Kegiatan Lanjutan	26 lembaga	31.904.700,00
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Kecamatan Bareng	13 desa				13 desa	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kecamatan Bareng	78 lembaga	15.150.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	78 lembaga	15.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN	INDIKATOR KINERJA		RENCA	NA TAHUN 2025		CATATAN	PRAKIRA	AN MAJU TAHUN 2026
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bareng	4 laporan	126.722.000,00	Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Lanjutan	4 laporan	16.904.700,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bareng Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi OPD dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Tahun 2025 didasarkan pada penyusunan RKPD Tahun 2025, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada tahun 2025, terdapat tiga prioritas pembangunan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan Harmonis
- 2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas
- 3. Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dan merata

Tema atau arah pembangunan daerah tahun 2025 yang harus diwujudkan adalah "Hilirisasi Agribisnis". Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Bareng. Sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Bareng dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun ke depan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun 2005-2025.

1.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Kecamatan Bareng berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng Tahun

- 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- b. Kecamatan Bareng berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bareng Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Bareng Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Bareng Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bareng tidak hanya sebagai panduan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kinerja. Untuk dapat mewujudkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Bareng Tahun 2025, tentu diperlukan sumber pembiayaan atau pendanaan yang memadai, serta kompetensi, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Selain itu, Renja Kecamatan Bareng juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan, sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik..

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Bareng ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan demi tercapainya Tema atau arah pembangunan daerah serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait serta desa-desa dalam wilayah Kecamatan Bareng perlu ditingkatkan, sehingga semakin memantapkan pencapaian yang telah diraih dan memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bareng Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudnya kegiatan pembangunan yang berkesinambungan.

KECAMATAN

OMBA

Jombang, 10 Juli 2024

TAH KCAMAT BARENG

USMAN, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19710806 199803 1 007